

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrianto, R., 2014. *Analisis Kelaikan Fungsi Jalan secara Teknis dengan Metode Kuantitatif (Studi Kasus: Ruas Jalan Nasional Batas Kota Sanggau – Sekadau, Kalimantan Barat)*. Tugas Akhir. Yogyakarta : Departemen Teknis Sipil dan Lingkungan, fakultas Teknis, Universitas Gadjah Mada.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 1992, *Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan (1992)*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 1993, *Panduan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jembatan*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 2018, *Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 2018, *Surat Edaran No. 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996, *Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum*, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2013, *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan*, Kementerian Perhubungan, Jakarta

- Mulyono, A.T., 2013. *Bimbingan Teknis Uji Laik Fungsi Jalan Nasional di Wilayah Kerja BBPJN-V*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Mulyono, A.T., 2015. *Paparan Tata Cara Penetapan Persyaratan dan Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan*, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Surabaya.
- Mulyono, A.T., 2018. *Pembekalan Singkat Persiapan Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan Nasional di Wilayah Kerja BBPJN-XI dan BPJN-XX*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Mulyono, A.T., 2019. *Paparan Hasil Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan Nasional di Lingkungan BBPJN-XI dan BPJN-XX*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Mulyono, A.T., 2019. *Paparan Hasil Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan Nasional di Lingkungan BPJN-XIV*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008, *Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*, Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan*, Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*, Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Republik Indonesia, 2015, *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan*, Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan*, Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan*, Kementerian Perhubungan, Jakarta.